



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 180/0003694 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Kepala Daerah kepada perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi untuk dilakukan pembahasan;
- b. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi dan guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan kepala daerah dimaksud, perlu ditetapkan perencanaan penyusunan rancangan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/062/OTDA tanggal 5 Januari 2021 perihal Implementasi Sistem Fasilitasi Peraturan Daerah Berbasis Elektronik (e-Perda);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dengan rincian rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,



PRASETYO ARIBOWO

SALINAN: Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah;

9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
10. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
21. Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
23. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
24. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
25. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
26. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah;
27. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah;
28. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
29. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah;
30. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
31. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 180/0003694 TAHUN 2021
 TENTANG
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa	Keterangan
1	2	3	4
A. Rancangan Peraturan Gubernur ajuan dari SKPD			
1.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tindaklanjut terbitnya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037
2.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Pelaksanaan/Amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Koridor Jaringan SUTET di Provinsi Jawa Tengah		Dalam rangka keselamatan ketenagalistrikan dan pemenuhan tertib tata ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029

4.	Sinergi Pengembangan Kompetensi Provinsi Jawa Tengah (Jateng Corporate University)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	a. Mandatori Regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; b. Mewujudkan Jateng Pinter Bareng dengan mensinergikan pengembangan kompetensi yang terintegrasi sampai dengan kabupaten/kota dalam rangka reformasi birokrasi
5.	Tata Cara Kerjasama Daerah	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	a. Kerjasama antar Pemerintahan Dalam Negeri; b. Kerjasama Pemerintahan dengan Pemerintah Luar Negeri/Dalam Negeri; c. Kerjasama antar Pemerintahan Daerah dengan Pihak Ketiga; d. Kerjasama Pemerimtah Daerah dengan Lembaga Luar Negeri.
6.	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Pelaksanaan / amanat dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan No 04 Tahun 2021)
7.	Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah	Biro Perekonomian	Pengaturan untuk semua BUMD Provinsi Jawa Tengah terkait pedoman pengelolaan perusahaan
8.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang PT PRPP (Perseroda)		Menunggu ditetepkannya Perda tentang PT.PRPP (Perseroda)
9.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang PT Air Bersih Tirta Utama (Perseroda)		Menunggu ditetepkannya Perda tentang PT.Air Bersih Tirta Utama (Perseroda)
10.	Perubahan Atas Peraturan Dearah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Kecamatan Jawa Tengah		Menunggu ditetepkannya Perda tentang PT.BPR BKK Jateng (Perseroda)

11.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Kecamatan		Penyesuaian terhadap regulasi baru dari OJK serta penguatan kelembagaan PT.BPR BKK se Jawa Tengah
12.	Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021		Alokasi anggaran dilaksanakan setiap tahun
13.	Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pelaksanaan amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor (P4GN)
14.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi di Rumah Sakit	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian	Amanat Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan yang telah disahkan pada tanggal 14 Desember 2020
15.	Penyelenggaraan Rumah Aman, Shelter dan Rumah Penampungan Sementara bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi	Penduduk dan Keluarga Berencana	
16.	Layanan Terpadu		
17.	Pencegahan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan		

18.	Perubahan Pergub Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak		Perubahan atas Perda 7 tahun 2013 berdampak pada perlunya mengubah Pergub sebagai pedoman pelaksanaannya yaitu Pergub Nomor 74 Tahun 2014 (amanat Perda Nomor 7 Tahun 2013)
19.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	a. Amanat RPJMD Provinsi Jawa Tengah pada program unggulan keempat satgas kemiskinan, bantuan desa dan rumah tidak layak huni; b. Isi dari Pergub sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini sehingga perlu adanya perubahan
20.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah		a. Amanat RPJMD Provinsi Jawa Tengah pada misi ketiga memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; b. Isi dari Pergub sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini sehingga perlu adanya perubahan
21.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2039		Pelaksanaan/amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039
22.	Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2030	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perlu dilakukan pengkajian sehubungan dengan adanya revisi/ penyempurnaan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030.

23.	Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<p>a. Perlu dilakukan pengkajian mengenai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi di Bidang Pertambangan sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan-Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;</p> <p>b. Sehubungan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang ini mengubah, menghapus atau menetapkan pengaturan baru.</p>
24.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Sektor Informal	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	<p>a. Optimalisasi Penempatan Tenaga Kerja untuk mendukung investasi di Jawa Tengah melalui sistem terintegrasi antara Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, Pencari Kerja, Pemberi Kerja, Bursa Kerja Khusus, Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta, dan Stakeholder terkait;</p> <p>b. Dalam rangka pelayanan perizinan, rekomendasi, fasilitasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat/stakeholder, perlu adanya dasar hulu dan panduan yang seragam di Jawa Tengah;</p> <p>c. Dalam rangka peningkatan kemampuan/skill calon pekerja melalui pelatihan/vokasi/kompetensi.</p>
25.	Kewajiban Tenaga Kerja Asing Kuasai Bahasa Indonesia		Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 45 sebagai upaya untuk mempermudah transfer knowledge kepada Tenaga Kerja Indonesia
26.	Penyelenggaraan Penerapan K3 di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah		Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di Jawa Tengah sebagai tindaklanjut kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

27.	Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Biro Organisasi	Tindak lanjut Permendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
28.	Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		Tindak lanjut rencana revisi Permendagri tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah
29.	Mal Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah		Tindak lanjut Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
30.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik.
31.	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah		Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Setda Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
32.	Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah		Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam rangka memperkuat peran dan kapasitas inspektorat daerah
33.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah		Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu rumah sakit Dearah provinsi sebagai unit organisasi Dinas Kesehatan yang bersifat khusus
34.	Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Moewardi Provinsi Jawa Tengah Kelas A		
35.	Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr.Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Kelas B		
36.	Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Kelas B		

37.	Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Rehatta Provinsi Jawa Tengah Kelas C		
38.	Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A		
39.	Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.Amino Gondhoutomo Provinsi Jawa Tengah Kelas A		
40.	Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Kelas A		
41.	Hasil Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
42.	Pelestarian dan Pengendalian Kawasan Danau Rawa Pening	Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Sebagai acuan mewujudkan perlindungan dan optimalisasi fungsi Kasawan Danau Rawa Pening.

43.	Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah	RSJD Dr.RM. Soedjarwadi	<p>a. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 98 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas pokok fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan ditinjau kembali;</p> <p>b. Sesuai Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 dan berdasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No.216/MENKES/SK/VI/2013 tentang Penetapan Kelas RSJD Dr. RM. Soedjarwadi sebagai rumah sakit khusus kelas A, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah sesuai tipe RS kelas A.</p>
43.	Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan & Perikanan	Perlu dilakukan pengkajian ulang sehubungan dengan telah terbitnya PermenKP No. 54 Tahun 2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan dan Izin Lokasi di Laut
44.	Perijinan Usaha Perikanan Tangkap di Jawa Tengah		<p>a. Perlu dilakukan sinkronisasi substansi perizinan usaha perikanan, karena telah terbit dan diundangkannya Permen KP Nomor 58 dan 59 Tahun 2020;</p> <p>b. Perlu sinkronisasi mekanisme perizinan agar sejalan dengan PP 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha terintegrasi secara elektronik (OSS)</p>

45.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah	Biro Hukum	Tindaklanjut Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
46.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelaksanaan/amanat Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Perlindungan Masyarakat
47.	Tunjangan Risiko Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah		
48.	Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Khusus di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Amanat dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Provinsi Jawa Tengah.
49.	Nomor 50 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah		Perlu dilakukan pengkajian sehubungan : a. Perluasan Pusat Layanan Autis menjadi Pusat Layanan Disabilitas (PP Nomor 13 Tahun 2020) Tentang Akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas); b. Perluasan TIKP Dikbud menjadi Pusat Pengembangan Media Pembelajaran dan Peningkatan Kompetensi Guru.
50.	Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah		Perlu dilakukan pengkajian sehubungan Hasil evaluasi dari Kemendikbud terkait mekanisme pelaksanaan Penerimaan Siswa Didik Baru di Tahun 2021

51.	Nomor 57 Tahun 2018 tentang Uraian Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada perubahan nomenklatur dari Balai Pelaksana Teknis Jalan (BPTJ) menjadi Balai Pengelola Jalan (BPJ); b. Anjab ABKnya agar disesuaikan dengan PermenPANRB Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; c. Perubahan nomenklatur PermenPANRB Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah.
52.	Kebijakan dan Strategi Provinsi dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum		<ul style="list-style-type: none"> a. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya, Pasal 14; b. Saat Direktorat Air Minum Ditjen CK sedang menyusun Jakstranas SPAM sehingga untuk sinkronisasi data Jakstraprov perlu menunggu Jakstranas; c. Pernah ada Pergub Jateng Nomor 47 Tahun 2015 tentang Jakstrada Pengembangan SPAM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 sehingga perlu pembaruan Pergub.
53.	Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penatausahaan		<ul style="list-style-type: none"> a. Mengatur hubungan dengan Penyedia Jasa kegiatan hanya dalam keadaan normal namun bilamana terjadi pemutusan hubungan kontrak, belum diatur pihak yang mengerjakan masa pemeliharaan; b. Di dalam kontrak hanya menyebutkan PPK dan tidak disebutkan PPTK, dalam kenyataannya yang tanda tangan di kwitansi pembayaran justru PPTK bukan PPKnya. Namun hal ini justru diatur dalam Pergub Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 88 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 Lampiran XIX Sistem dan Prosedur Belanja Langsung Barang dan Jasa Huruf C.2. (i); c. Staf teknis bertanggungjawab pelaksanaan pekerjaan di lapangan, namun sejak tahun 2020 tanggung jawab itu diserahkan/dilaksanakan oleh konsultan.

54.	Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Khusus Operasional di Lingkungan Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah	RSUD Tugurejo	Perubahan isi disesuaikan dengan kesepakatan RSUD/RSJD Provinsi Jawa Tengah
55.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah		
56.	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
57.	Satu Data Jawa Tengah		Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
58.	Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Pengkajian kembali
59.	Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah		

B.	Rancangan Peraturan Gubernur Kumulatif Terbuka
1.	Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Dan Perubahannya
2.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Dan Perubahannya
3.	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Dan Perubahannya
4.	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Dan Perubahannya
5.	Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Perubahannya
6.	Pemberian Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas Dan Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Perubahannya

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,



PRASETYO ARIBOWO